

RESPONS PUBLIK TERHADAP WACANA PENERAPAN FULLDAY SCHOOL BAGI KEBERLANGSUNGAN MADRASAH DINIYAH DI KOTA PEKALONGAN

Nurul Istiani

Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Pekalongan, Indonesia

Corresponding Author: istianinurul6@gmail.com

ABSTRAK

Wacana implementasi *fullday school* di Indonesia menimbulkan berbagai respons pro-kontra, tidak terkecuali di kota Pekalongan. Tujuan penelitian ini untuk mendiskripsikan respons publik terhadap pemberlakuan sistem *fullday school* dan relevansinya pada keberlangsungan madrasah diniyah di kota Pekalongan. Penelitian kualitatif ini menggunakan tehnik dokumentasi sebagai media pengumpulan data. Tehnik analisis data menggunakan tahap reduksi, penyajian dan verifikasi. Adapun data primer menggunakan berbagai media dan surat kabar tentang wacana *fulldayschool*. Sementara data sekunder menggunakan data yang korelatif terhadap pokok bahasan ini. Hasil penelitian ini menyimpulkan kebijakan implementasi *fullday school* dapat menimbulkan kekhawatiran bagi madrasah yang ada di Kota Pekalongan terkait kurangnya potensi masyarakat akibat pergeseran waktu yang lebih panjang. Kontribusi penelitian ini menekankan pentingnya konsideran lokalitas sosial dan kultural keagamaan dalam kebijakan pemerintah terkait inovasi aktifitas pendidikan nasional.

Kata Kunci: *Fullday School*, Madrasah Diniyah, Pekalongan

ABSTRACT

The discourse on the implementation of full-day schooling in Indonesia has sparked various pros and cons, including in the city of Pekalongan. The purpose of this study is to describe public responses to the implementation of the full-day schooling system and its relevance to the sustainability of madrasah diniyah (Islamic elementary schools) in the city of Pekalongan. This qualitative study uses documentation techniques as a means of data collection. Data analysis techniques involve reduction, presentation, and verification stages. Primary data is obtained from various media and newspapers discussing the full-day school discourse. Meanwhile, secondary data is obtained from data correlative to this topic. The results of this study conclude that the implementation of the full-day school policy may cause concern for madrasahs in Pekalongan City due to the lack of community potential resulting from the longer shift in time. This study emphasizes the importance of considering social and cultural religiosity in government policies related to innovations in national education activities.

Keywords: *Fullday School*, Madrasah Diniyah, Pekalongan

PENDAHULUAN

Maraknya berbagai krisis pendidikan karakter di era digital saat ini tentu sangat sangat mempengaruhi berbagai faktor, terutama dalam lingkup dunia pendidikan. Hal demikian terjadi karena proses mengubah tingkah laku seseorang dapat dilakukan melalui proses pendidikan [Samsul Nizar, 2002: 31]. Pendidikan tersebut dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk mengubah sikap dan tingkah laku seseorang agar mencapai tujuan yang diharapkan [Hasan Langgulung, 1995: 32]. Pendidikan juga dapat diartikan sebagai salah satu usaha untuk mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan oleh bangsa baik melalui karakter keagamaan, maupun sikap spiritual yang dimiliki [UU RI, 2003: 12].

Keberhasilan suatu pendidikan dapat dilihat dari berbagai faktor, di antaranya faktor dari guru, peserta didik maupun sumber daya yang ada di lingkungan tersebut. Hal demikian dapat dilihat dari moralitas para alumni yang tidak mengabaikan intelektual dan kecakapan hidup. Selain itu, faktor dari lingkungan masyarakat juga sangat berpengaruh dalam membentuk lingkungan pendidikan yang partisipatif [Aminusyay, dkk, 2023: 3].

Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa moralitas dikategorikan sebagai pondasi dasar dalam membangun manusia yang tangguh. Namun pada realitanya, dalam setiap tahun terjadi kemerosotan moralitas peserta didik yang sangat jauh dari tujuan pendidikan yang diharapkan oleh bangsa, sehingga sebagai upaya pencegahan dalam menanggulangi kemerosotan moral yang lebih serius, diperlukannya berbagai peran pemerintah dengan menginternalisasikan muatan nilai keagamaan dan budi pekerti yang diintegrasikan dalam sebuah kurikulum 2013, salah satunya kebijakan fullday school. Kebijakan dalam pendidikan tentu sangatlah penting. Hal demikian dimaksudkan untuk mengetahui kondisi sosial suatu lingkungan ataupun daerah tersebut, menyesuaikan kebijakan yang telah berlaku sebelumnya, serta merancang sistem kebijakan untuk masa yang akan datang [Nurochman, 2025:2].

Fullday school diartikan sebagai salah satu program ataupun kebijakan mengenai sekolah yang berlangsung dari pukul 07.00 s.d 15.00 WIB dengan proses transformasi pembelajaran yang aplikatif, interaktif, dan kondusif untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang diharapkan [Nor Hasan, 2006: 110-111]. Berkaitan dalam hal ini, diperlukan berbagai macam potensi peserta didik yang harus dikembangkan baik dalam bidang akademik maupun bidang non akademik (Istiani, Firdaus, 2024: 217). Penerapan *fullday school* bertujuan sebagai salah satu upaya solutif untuk mengatasi permasalahan pendidikan baik dari segi moral maupun prestasi peserta didik [Baharuddin, 2009: 229-230].

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan kebijakan fullday school dijadikan sebagai pilihan alternatif bagi orangtua yang mempunyai aktifitas pekerjaan tinggi. Hal demikian dapat dilihat dari banyaknya peserta didik yang tidak dapat dikontrol akhlaknya yang menjadi kemerosotan akhlak yang liar. Dampak positif *fullday school* yang diharapkan yakni anak mendapatkan pengawasan yang teratur baik di rumah oleh orangtuanya, maupun di sekolah oleh dewan guru dengan cara mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan [Kompas, 2016].

Pernyataan demikian bertentangan dengan realitas yang terjadi di lapangan. Hal ini terjadi karena kebijakan tersebut belum mampu membawa perubahan yang signifikan di kota-kota kecil. Perubahan yang signifikan justru terjadi pada kota-kota besar [Kompas, 2016]. Oleh karena itu, diperlukannya kajian tentang kebijakan implementasi *fullday school* dan tantangan keberlangsungan madrasah diniyah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dalam bentuk pustaka ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan wacana *fullday school* terhadap keberlangsungan keberadaan madrasah diniyah di kota Pekalongan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi. Adapun teknik analisa data menggunakan tahap reduksi, penyajian dan verifikasi. Data primer penelitian ini menggunakan pemberitaan di berbagai media masa, antara lain radar pekalongan, tempo, dan Kompas. Sementara data sekunder menggunakan berbagai penelitian yang relevan terhadap bahasan pokok penelitian ini, sehingga diharapkan mampu memberi pemahaman secara komprehensif mengenai kebijakan *fullday school* di Kota Pekalongan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peluang *Fullday School* sebagai Inovasi Pembelajaran Intensif

Fullday school merupakan salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada dunia pendidikan yang berkaitan dengan keadaan moralitas peserta didik. Berdirinya program *fullday school* ini tentunya dilatarbelakangi karena adanya beberapa tuntutan dari para orangtua, di antaranya: *Pertama*, kurangnya waktu bersama dengan keluarga yang memiliki aktifitas tinggi. *Kedua*, diperlukannya pengawasan yang intens bagi anak yang kurang mendapatkan perhatian waktu dari orangtuanya. *Ketiga*, diperlukannya penambahan jam pelajaran keagamaan. *Keempat*, diperlukannya peningkatan kualitas pendidikan [Marfiah Astuti, 2013: 134].

Kurikulum yang diterapkan dalam program *fullday school* sejatinya tidak jauh berbeda dengan kurikulum sekolah pada umumnya. Akan tetapi, ada beberapa penekanan tambahan dalam hal kepemimpinan, keagamaan, dan pengetahuan tentang teknologi informasi dan komunikasi. Dengan adanya penambahan dalam beberapa hal tersebut, diharapkan mampu memberikan warna yang berbeda dengan sekolah –sekolah pada umumnya [Moch.Mudzakir, 2].

Dari berbagai keunggulan yang dimiliki dalam kebijakan program *fullday school* ini, pemerintah berusaha untuk menawarkan program kebijakan tersebut pada kota-kota yang berada di Indonesia, salah satunya kota Pekalongan sebagai upaya penanganan yang tepat dalam rangka menyeimbangkan antara pengetahuan umum dengan pengetahuan agama yang tentunya berbasis teknologi. Keseimbangan tersebut diharapkan mampu menjadi perkembangan yang holistik bagi siswa (Kurniawan, dkk, 2025: 1). Akan tetapi, kenyataan di lapangan tidak sesuai dengan teori yang ada.

Permasalahan adanya keragaman lingkungan belajar di Indonesia, kebijakan program *fullday school* mungkin saja cocok diterapkan di beberapa sekolah perkotaan (urban) di mana tingkat kesibukan orangtua sangat tinggi. Begitu juga di sekolah berasrama di mana kegiatan siswa dipantau selama 24 jam dan memiliki fasilitas asrama. Kebijakan program *fullday school* belum cocok diterapkan disekolah non urban, hal demikian dikarenakan kebanyakan orangtua memiliki jadwal kerja yang masih relatif fleksibel dan memiliki lebih banyak waktu bersama anak di rumah. Kebanyakan mereka ada yang menjaga toko, menghabiskan waktu luang untuk bermain dan bersosialisasi bersama temannya, bahkan ada juga diantara mereka yang lebih memntingkan untuk mengikuti pendidikan non formal yaitu TPQ atau Madin [Zamzami, 2016].

Kebijakan program *fullday school* ini tentunya tidak bisa didasarkan pada pengalaman perorangan, melainkan harus berdasarkan atas kebutuhan para orangtua di suatu daerah. Pengambilan kebijakan nasional juga tidak boleh parsial. Tidak boleh hanya berdasarkan pengalaman pribadi. Berkaitan dengan wacana *fullday school* dalam koran Harian Radar Pekalongan menyebutkan bahwa wacana tersebut justru akan merugikan anak, apalagi jika tidak didahului dengan kajian yang matang [Radar Pekalongan, 2016].

Tantangan Madrasah Diniyah Sebagai Lembaga Pendidikan Islam Non Formal

Madrasah diniyah merupakan salah satu bagian dari sistem pendidikan nasional yang mendapatkan respon positif oleh berbagai masyarakat. Bahkan, kedudukan madrasah diniyah dijadikan sebagai pondasi utama kebijakan pendidikan agama Islam. Hal demikian dikarenakan sistem pendidikan nasional belum mampu menginternalisasikan program-program keagamaan di dalamnya [M.Ishom El-Saha, 2014]. Madrasah diniyah diartikan sebagai lembaga pendidikan keagamaan Islam yang sudah berdiri sejak masa lampau. Keberadaan madrasah diniyah dikenal dengan istilah sekolah arab atau sekolah sore dengan sistem yang mampu memasukan unsur-unsur pendidikan dasar agama, Oleh karena itu, penting tentunya untuk melakukan evaluasi pada madrasah yang mampu menginternalisasikan nilai-nilai ke-Islaman secara praktis (Badrudin, 2017: 20)

Dalam sejarah perkembangannya, madrasah dikategorikan pada dua jenis, yakni madrasah diniyah dan madrasah non- diniyah. Madrasah *diniyah* merupakan lembaga pendidikan keagamaan yang kurikulumnya 100% materi agama. Adapun madrasah *non-diniyah* adalah lembaga pendidikan keagamaan yang kurikulumnya, di samping materi agama, meliputi mata pelajaran umum dengan prosentase beragam [Mohammad Kosim, 2007: 42]. Pendidikan berbasis agama ini memiliki potensi yang lebih besar dalam membentuk karakter dan moral para siswanya (Megawati, Sulis, 2025: 1477). Hal demikian dikarenakan pendidikan berbasis agama tersebut membutuhkan analisis yang mendalam tentang fungsi dari pendidikan Islam itu sendiri [Kuncoro, 2024: 89]. Namun pada realitanya, madrasah diniyah seakan kehilangan fungsi yang sesungguhnya. Hal demikian terjadi karena banyaknya orangtua yang memiliki aktifitas pekerjaan hingga sore hari, sehingga mereka beranggapan bahwa *fullday school* merupakan salah satu solusi untuk tetap menyekolahkan anaknya agar tetap mendapatkan materi keagamaan. Selain mendapatkan materi keagamaan, para orangtua juga merasa aman karena adanya

pengawasan ketat dari para guru di sekolah yang menerapkan kebijakan *fullday school*.

Penerapan kebijakan program *fullday school* tentunya memberikan pengaruh yang sangat signifikan. Apabila sistem *fullday school* efektif diterapkan, TPQ dan Madin di tengah masyarakat, pastinya akan hilang dan tergerus dengan sendirinya. Selain itu, kegiatan sosialpun akan hilang dengan sendirinya. Hal demikian terjadi karena kurangnya kegiatan maupun aktifitas sosial yang dijalankan, padahal sebagai makhluk sosial tentunya tetap membutuhkan interaksi sosial baik dengan orangtua, sesama siswa, maupun dengan lingkungannya.

Dalam surat kabar Tempo juga disebutkan jika kebijakan tersebut diterapkan tentunya dapat menimbulkan dampak negatif apabila siswa SD dan SMP diwajibkan sekolah dari pagi sampai sore, dilihat dari aspek psikologis mental anak tidak akan positif, sebab seorang siswa hanya mampu menyerap pelajaran secara efektif pada kegiatan belajar mengajar dari pagi hingga pukul 12.00-13.00 WIB. Jika dilihat dari aspek ekonomi, kebijakan ini akan memberatkan orangtua karena jika jam sekolah sampai sore, itu akan menambah biaya. Dan jika dilihat dari aspek geografis daerah ataupun kota, program kebijakan tersebut akan membahayakan anak. Jika kegiatan belajar sampai sore, bisa saja akan ada anak yang baru sampai rumah pada malam hari. Jika kebijakan tersebut diterapkan, akan dapat mengganggu belajar di non formal yang biasanya digelar malam hari dan hal tersebut dapat mengancam keberadaan madrasah diniyah dan taman pendidikan al-Qur'an [Tempo, 2016].

Polemik Fullday School di Indonesia

Problematika kebijakan *fullday school* di Indonesia tentunya memberikan berbagai sudut pandang yang berbeda terhadap masyarakat sekitar, salah satunya pada siswa sekolah dasar. Implementasi *fullday school* di sekolah dasar tentunya lebih memberikan dampak positif, karena para siswa memiliki waktu yang lebih bisa dikontrol oleh pihak sekolah. Mengingat sebagian orangtua adalah para pekerja, sehingga mereka merasa lebih aman jika anak-anak masih dalam pengawasan para guru [Mertika, 2020: 49]. Begitu juga pada salah satu sekolah yang bernuansa Islami / Madrasah Ibtidaiyah. Para orangtua lebih menyukai anak untuk belajar di sekolah dengan durasi waktu yang lebih intens sehingga memungkinkan untuk mendapatkan materi yang lebih mendalam. Hal demikian seringkali didukung oleh berbagai pihak, diantaranya dukungan dari kebijakan yayasan yang dinaungi, sumberdaya pendidik yang memenuhi, serta walimurid yang supportif [Muhammad Iqbal, 2023: 212].

Berbeda dengan ragam sudut pandang di atas, beberapa ragam sudut pandang yang berbeda justru sangat menentang terhadap kebijakan *fulldayschool*. Hal demikian terjadi karena kebijakan *fullday school* dianggap mengurangi interaksi dengan anggota keluarganya serta dapat menghilangkan sosialisasi siswa dengan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya [Chieka Aisyah, 2023: 60]. Sehingga seringkali anak yang sekolah dengan sistem *fullday school* hanya lebih fokus pada hubungan dengan guru dan teman-temannya saja dari pada hubungan dengan orangtuanya. Problem tersebut dikhawatirkan dapat merusak ketrampilan untuk bersosialisasi padakehidupan sehari-harinya [Putri

Hana Pebriana: 128]. Dari berbagai ragam sudut pandang tersebut, tentunya penting bagi pemerintah untuk mengkaji ulang bagaimana agar kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Respons Masyarakat Kota Pekalongan Terhadap Wacana *Fullday school* dan Implikasinya Bagi Keberlangsungan Aktifitas Pendidikan Madrasah Diniyah

Kebijakan pendidikan secara kuantitatif dapat meningkatkan derajat rasionalitas dalam proses pembuatan keputusan. Kebijakan pendidikan merupakan suatu produk yang dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan pendidikan yang bersifat legal dan mampu disesuaikan dengan lingkungan pendidikan yang moderat. Sebuah kebijakan dapat dikatakan berhasil jika memenuhi karakteristik dari kebijakan pendidikan tersebut. Dalam membuat sebuah kebijakan hendaknya disesuaikan dengan tujuan pendidikan, harus memenuhi aspek legal dan formal, harus memiliki konsep yang operasional, dibuat oleh yang berwenang, dapat dievaluasi, dan tentunya memiliki sebuah sistematika.

Melihat karakteristik untuk membuat suatu kebijakan, kita bisa mengaitkan tentang kebijakan *fullday school* terhadap Keberadaan Madrasah Diniyah di kota Pekalongan. *Pertama*, dengan melihat tujuan dari kebijakan tersebut. Salah satu tujuan diadakannya *fullday school* yakni membangun karakter peserta didik agar lebih terkontrol baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah [Kompas, 2016]. Berdasarkan alasan yang disampaikan oleh kemendikbud tersebut, salah satu tujuan utama diterapkannya *fullday school* yakni dapat memberikan kontribusi positif pada dunia pendidikan saat ini. Namun demikian, jika disandingkan dengan pendidikan diniyah, tujuannyapun akan berbeda.

Kedua, untuk menentukan sebuah kebijakan dan agar bisa diakui secara sah bisa berlaku di suatu daerah atau wilayah, maka harus disesuaikan dengan kondisi dan keadaan di suatu wilayah tersebut sehingga bisa dijadikan sebagai suatu kebijakan pendidikan [Abdullah, 150]. Kaitannya dengan *fullday school* dan keberadaan Madrasah diniyah di kota Pekalongan, menurut hemat peneliti kebijakan tersebut kurang sesuai diterapkan di wilayah kota pekalongan, karena pekalongan sendiri masih merupakan kota kecil dan identik dengan kota santri. Di mana anak-anak masih banyak yang mengikuti pendidikan diniyah ketika sore hari, yaitu sekitaran pukul 16.00-17.00 Wib. Jika kebijakan *fullday school* tersebut diterapkan, pastinya keberadaan madrasah diniyah akan sepi siswa, karena siswa sudah merasa lelah untuk belajar.

Pendidikan *fullday school* ini menurut hemat peneliti akan tepat diterapkan pada masyarakat perkotaan yang kotanya sangat besar. Karena di kota-kota besar, para orangtua sering menghabiskan waktu untuk bekerja diluar rumah sehingga sistem *fullday school* cocok untuk menjadi suatu alternatif dalam menanamkan pendidikan karakter bagi anaknya. Akan tetapi, akan sangat menjadi sebuah kontradiktif jika diberlakukan di seluruh wilayah termasuk kota Pekalongan, karena masyarakat Pekalongan, rata-rata para orangtua mempunyai suatu usaha batik, yang mana para anaknya setelah sepulang sekolah biasa membantu pekerjaannya dan dilanjutkan dengan mengikuti sekolah sore atau madin.

Ketiga, untuk bisa menjadi sebuah kebijakan pendidikan harus mempunyai konsep operasional, maksudnya harus bisa memperjelas sebuah tujuan yang ingin dicapai [Elwijaya, 2021]. Terlebih lagi sebuah kebutuhan terhadap kebijakan pendidikan merupakan fungsi pendukung pengambilan sebuah keputusan. Namun pada kenyataannya, banyak sekolah yang belum memiliki sarana prasarana yang memadai untuk menerapkan sistem belajar yang kondusif dan menyenangkan bagi para siswanya. Rancangan bangunan kurikulumnya pun untuk *fullday school* belum dirancang, belum lagi dampak pembiayaan yang ditimbulkan bagi orangtua, sekolah dan pemerintah [Ruchman Bashori, 2016].

Keempat, kebijakan program *fullday school* seyogyanya dibuat oleh para pemangku kebijakan yang memiliki kewenangan dalam dunia pendidikan. *Kelima*, dapat dievaluasi [Herza, 2023]. Sebuah kebijakan yang ditetapkan jika sudah dipertahankan dan dikembangkan pastinya harus selalu dievaluasi agar dapat memperbaiki sebuah kebijakan tersebut. Menurut hemat peneliti, kebijakan *fullday school* sebelum diterapkan juga harus dievaluasi terlebih dahulu, baik dampak positifnya ataupun dampak negatifnya. Contohnya saja ketika wacana *fullday school* akan diterapkan di kota Pekalongan, pastinya ada suatu hal yang berdampak negatif ataupun positifnya. Dampak positifnya yaitu bagi para orangtua yang lebih banyak menghabiskan waktu untuk dikantor, tidak perlu lagi cemas terhadap anaknya, karena di sekolah akan diberikan materi tambahan yang berkaitan dengan pendidikan karakternya dan keagamaan. Akan tetapi juga harus dilihat dampak negatifnya, seperti jika pendidikan *fullday school* diterapkan maka secara otomatis anak-anak tidak bisa mengikuti sekolah diniyah yang dilakukan pada sore hari.

KESIMPULAN

Kebijakan program *fullday school* merupakan sebuah program pendidikan yang mampu menginternalisasikan nilai-nilai keagamaan pada sebuah pendidikan formal yang diterapkan mulai pukul 07.00 s/d 15.00 WIB. Selain mampu menginternalisasi materi keagamaan, juga mampu mengintegrasikan berbagai kreativitas siswa dan pengetahuan berbasis teknologi pendidikan yang termuat dalam pembelajaran. Penerapan *fullday school* ini tentunya membawa dampak positif ataupun dampak negatif terlebih di wilayah pekalongan yang merupakan kota santri. Dampak positifnya yaitu bisa terpenuhinya waktu peserta didik untuk mendapatkan materi pengembangan di sekolah bagi yang orangtuanya lebih banyak menghabiskan waktu diluar rumah. Sedangkan dampak negatifnya yaitu para siswa tidak bisa mengikuti kegiatan sekolah sore untuk belajar keagamaan. Keterbatasan penelitian ini belum mengidentifikasi terkait fleksibilitas wacana implementasi *fullday school* dalam beradaptasi dengan aktifitas keberlangsungan madrasah diniyah di Kota Pekalongan. Hal tersebut penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah, Alchonity Harika Fitri, Ayu Mustika sari, Nurhizrah Gistituat, Rusdinal. 2022. Tahapan Pembuatan Kebijakan Publik Sebagai Landasan Pengambil Kebijaksanaan. *Jurnal Muara Pendidikan*, Vol. 7 No. 1.
- Aminusyai, Achmad Fachrurozi, Ahmad Ta'rifin, Sri Eka Fitriyaningsih, Nurul Istiqomah, Nikmatul Azizah, Khoirun Nida. 2024. Peran Sarana-Prasarana Dalam Peningkatkan Mutupendidikan Di Madrasah Aliyah Pembangunan Uin Syarif Hidayatullah Jakarta. *IEMJ: Islamic Education And Management Journal*, Vol.1, No.1.
- Astuti, Marfiah. 2013. Implementasi Program *Fullday school* Sebagai Usaha Mendorong Perkembangan Sosial Peserta Didik TK Unggulan Al-Ya'lu Kota Malang, *Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan*, Vol.1, No.2.
- Badrudin. 2017. Indonesia's Educational Policies On Madrasah Diniyah (MD). *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.3, No.1.
- Baharuddin. 2009. *Pendidikan dan Psikologi Perkembangan*, Jogjakarta: Arruz Media.
- Bashori, Ruchman, "Kenapa Harus *Fullday school*?".
Edukasi.Kompas.com.
- El-Sha, M.Ishom. 2014. Dosen IAIN Banten dan STAINU Jakarta, "Pendis", Edisi No.II, Februari, 2014.
- Elwijaya, Fadiya, Vivi Mairina, Nurhizrah Gistituati. 2021. Konsep dasar kebijakan pendidikan. *JRTI: Jurnal Riset Tindakan Indonesia*, Vol. 6, No. 1.
- Istiani, Nurul, Firdaus, Arham Ali. 2024. Muslim Learners' Self-Confidence Building In Public Spaces: Study Of Cheerful Wednesday Program At Smp Negeri 7 Pekalongan. *Tatho: International Journal of Islamic Thoughtand Sciences*, Vol.1, No.4.
- Kinanti, Chieka Aisyah, Kailla Putri Aisyah , Sylmi Adila , Alma Miftaqiyah. 2023. Pengaruh Sistem Pembelajaran Full Day School Terhadap Perkembangan Peserta Didik. *Jispendiora: Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora* Vol. 2, No.2.
- Kosim, Mohammad. 2007. Madrasah Di Indonesia. *Tadris*, Vol.2, No.1.
- Kuncoro, Anis Tyas. 2024. Kontribusi Pendekatan Kultural Dalam Perkembangan lembaga Pendidikanislam Di Indonesia. *IEMJ: Islamic Education And Management Journal*. Vol.1, No.2.
- Kurniawan, Redite dkk. 2025. Cognitive religious alignment in expressive writing: Insights from Islamic schools. *Reading & Writing – AOSIS: Journal of the Literacy Association of South Africa*.
- Langgung, Hasan. 1995. *Manusia dan Pendidikan: Suatu Analisa Psikologi dan Pendidikan*, Jakarta: Al-Huzna Zikra.
- Megawati, Sulisworo Dwi. 2024. Transformative Education in Character Development of Students in Religious-Based Schools: Narrative Review. *Edu Cendekia: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, Vol. 4, No.3.
- Mertika, Frahasini. 2020. Dampak Sosial Sistem Full Day School Bagi Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesia*, Vol.5, No.2.
- Mudzakkir, Moh., Renata Widya Nanda. Transformasi Sistem Pendidikan *Fullday school* di Era Globalisasi. *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial UNS*.

- Nashrulloh, Muhammad Iqbal, Ravi Dwi Ramandhika, Yusuf Rendi Wibowo Shaleh. 2023. Kebijakan Full Day School di Sekolah Dasar: Problematika dan Solusinya. Sekolah Dasar: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan Volume 32, No.02.
- Netti, Herza Netti, Sri Hidayati. 2023. Analisis Kebijakan Pendidikan Full Day Schools Pada Tingkat Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Di Kota Pariaman (Studi kasus: SMAN 4 Pariaman), Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara, Vol. 17, No.2.
- Nizar, Samsul. 2002. *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Ciputat Press.
- Nor Hasan. 2006. *Fullday school Model Atrernatif Pembelajaran Bahsa AsinG. Tadris*, Vol.1, No.1.
- Nurochman. 2025. Tinjauan Sosiologis Terhadap Tantangan Impelementasi Regulasi Wajib Belajar Di Indonesia. *IEMJ: Islamic Education and Management Journal*. Vol.2, No.1.
- Pebriana, Putri Hana Pebriana. TT. Analisis Dampak Kebijakan Full Day School di Sekolah Dasar: Studi Literature Review. *EDUCARE: Jurnal Pendidikan dan Kesehatan Lembaga Penelitian Dan Publikasi Ilmiah (LPPI) Yayasan Almahmudi Bin Dahlan*,
- Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003. 2003. *Sistem Pendidikan Nasional*, Bandung: Citra Umbara.
- Www. Nasional.kompas.15 agust 2016 mendikbud muhadjir effendi tanggapi penolakan fulday. 26 sep
- www.kompas.com, *Ini Alasan Mendikbud Usulkan Fullday School*.
- Www.Radarpekalongan.com, *Ganti Menteri jangan Ganti Kebijakan: Fullday school Dianggap Akan Ganggu Kehidupan Sosial Anak*.
- www.tempo.com, *PKB dan PPP Tolak Sekolah Fullday school*.
- Zamzami, dalam Kompasiana.com, *Konsep Fullday school Solusi atau Masalah*.